PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kab. Kediri

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi – Universitas Nusantara PGRI Kediri

Oleh:

YULI FARIDA

NPM: 11.1.02.01.0210

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

2015

Skripsi oleh:

YULI FARIDA

NPM : 11.1.02.01.0210

Judul:

PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kab. Kediri

Telah disetujui untuk diajukan Kepada Panitia Ujian / Sidang Skripsi
Program Studi Akuntansi-Fakultas Ekonomi
Universitas Nusantara PGRI Kediri

Tanggal : **10 Desember 2015**

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Sri Aliami	**Dyah Ayu Paramitha,S.E, M.Ak**
NIDN.0716086403	

ii

Skripsi oleh:

YULI FARIDA

NPM : 11.1.02.01.0210

Judul:

PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kab. Kediri

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian / Sidang Skripsi
Program Studi Akuntansi-Fakultas Ekonomi
Universitas Nusantara PGRI Kediri

Pada tanggal : **06 Januari 2016**

dan Dinyatakan telah Memenuhi Persyaratan

Panitia Penguji:

1. Ketua : Dr. Sri Aliami
2. Penguji I : Dra. Puji Astuti, M.M, M.Si
3. Penguji II : Dyah Ayu Paramitha, S.E, M.Ak

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi,

Dr. Subagyo
NIDN : 0717066601

iii

PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kab. Kediri

Yuli Farida
11.1.02.01.0210
Ekonomi – Akuntansi
yulifarida8@gmail.com
Dr. Sri Aliami dan Dyah Ayu Paramitha, S.E, M.Ak
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Pajak merupakan penerimaan langsung yang segera bisa diolah guna untuk pembiayaan berbagai macam keperluan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel bebas yaitu Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak, sedangkan variabel terikatnya yaitu Penerimaan Pajak.

Jumlah sampel penelitian ini adalah 70 pegawai pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kab.Kediri. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah *convenience sampling*, sedangkan metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

Teknik validasi instrument menggunakan uji validitas dengan melakukan uji signifikasi dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} untuk sampel 70. Nilai r tabelnya yaitu 0,235. Uji reliabilitas jika memberikan nilai *Cronbach Alpha*> 0,70.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kewajiban kepemilikan NPWP (X_1), pemeriksaan pajak (X_2), dan penagihan pajak (X_3) mempunyai F_{hitung} 25,097 dengan tingkat signifikan 0,000, karena probabilitas 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak artinya bahwa kewajiban kepemilikan NPWP (X_1), pemeriksaan pajak (X_2), dan penagihan pajak (X_3) mempengaruhi penerimaan pajak.

Kata kunci: Kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan penerimaan pajak.

I. LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang berkembang, sebenarnya Indonesia memiliki berbagai macam potensi untuk menjadi negara yang lebih maju. Namun, pada kenyataannya Indonesia tidak bisa memanfaatkan berbagai potensi itu. Salah satu masalah terbesar adalah masalah di sektor ekonomi, untuk memperbaiki masalah tersebut maka pajak diharapkan bisa menjadi solusi yang efektif.

Pajak merupakan penerimaan langsung yang segera bisa diolah guna untuk pembiayaan berbagai macam keperluan negara. Dirjen pajak berupaya membuat wajib pajak secara sukarela membayar pajaknya terutama para wajib pajak pengusaha. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menertibkan kepemilikan NPWP bagi setiap wajib pajak badan maupun perorangan.

Selain mewajibkan masyarakat sebagai wajib pajak untuk memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), pemerintah juga perlu meningkatkan penegakkan hukum lain. Penegakkan hukum ini salah satunya dapat berupa pemeriksaan dan penagihan.

Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memberi efek jera terhadap wajib pajak nakal sehingga tidak mengulang perbuatan yang sama dimasa depannya. Selain itu sering kali juga wajib pajak dengan sengaja mencurangi pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan, oleh sebab itu untuk menguji kepatuhannya perlu pula dilakukan pemeriksaan. Adapun pemeriksaan pajak ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui unit pelaksana yaitu fungsional pemeriksa pajak baik yang berada di kantor pelayanan, kantor wilayah, maupun kantor pusat.

Selain pemeriksaan pajak, ada juga kebijakan yang dilakukan dalam usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan **penagihan pajak** secara lebih aktif kepada setiap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya.

Penagihan pajak ini dilakukan karena masih banyaknya wajib pajak terdaftar yang tidak melunasi utang pajaknya, sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang tentang penagihan pajak diharapkan kegiatan penagihan pajak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena telah terlihat jelas bahwa tujuan dibuatnya Undang – undang tersebut adalah sebagai landasan hukum bagi fiskus untuk melakukan penagihan kepada wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak sehingga wajib pajak pun termotivasi untuk membayar yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang menguji tentang penerimaan pajak,

penelitian ini merupakan implikasi dari penelitian yang salah satunya dilakukan oleh Herryanto dan Toli (2013).

Berdasarkan pada penelitian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Wilayah Kediri.

Dengan menggunakan beberapa variabel yang berbeda dengan penelitian sebelumnya diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau gambaran tentang pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Untuk itu, penulis melakukan penelitian berjudul:

"Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak". (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare Kab. Kediri)

B. Identifikasi Masalah

1. Kewajiban Kepemilikan NPWP memiliki dampak yang sangat besar di dalam penerimaan pajak.
2. Tingkat kesadaran masyarakat semakin di tingkatkan untuk memiliki NPWP terutama dalam perusahaan.
3. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan yang terjadi terhadap penerimaan pajak.
4. Penagihan pajak merupakan upaya fiskus di dalam menerapkan pembayaran pajak untuk tepat waktu.
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penerimaan pajak diantaranya kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak.

C. Batasan Masalah

1. Variabel bebas terdiri atas kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak, sedangkan variabel terikat yaitu penerimaan pajak.
2. Tahun penelitian yang digunakan antara tahun 2010 – 2014.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Kewajiban kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Pare?
2. Bagaimana pengaruh Pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Pare?
3. Bagaimana pengaruh Penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Pare?
4. Bagaimana pengaruh kewajiban kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP), pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Pare?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam melakukan penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Apakah Kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Pare.
2. Apakah Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Pare.
3. Apakah Penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Pare.
4. Apakah kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Pare.

F. Kegunaan Penelitian

1. Praktis

a. Bagi wajib pajak

Diharapkan dapat menambah wawasan wajib pajak serta menjadi masukan agar wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

c. Bagi peneliti

Dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya perpajakan yang telah diperoleh dan dipelajari selama masa perkuliahan dan memberikan pemahaman lebih terhadap materi yang didapat serta sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Universitas Nusantara PGRI Kediri.

d. Bagi pembaca

Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan.

2. Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya penerimaan pajak terhadap kas negara yang dapat memberikan dampak secara signifikan di dalam pembangunan.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis khususnya yang berkaitan dengan penerimaan pajak.

II. METODE

A. Variabel Penelitian

1. Identifikasi Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadI variabel terikat adalah penerimaan pajak(Y).

Sedangkan yang menjadi variabel bebas adalah kewajiban kepemilikan NPWP (X1), pemeriksaan pajak (X2), dan penagihan pajak (X3).

2. Definisi Operasional Variabel

Pengukuran variabel kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak berdasarkan nilai indikator

pernyataan yang menggunakan skala *likert* 5 poin yang terdiri dari: (5) Sangat setuju, (4) Setuju, (3) Netral, (2) Tidak setuju, (1) Sangat tidak setuju. Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel regresi linier berganda.

B. Teknik dan Pendekatan

Teknik dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif. Teknik deskriptif adalah teknik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena disajikan dengan angka.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data primer yang didapatkan dengan cara menyebar kuesioner. Waktu penelitian ini secara keseluruhan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan terhitung dari Juli 2015 sampai dengan bulan Desember 2015.

D. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Fiskus yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama diwilayah Kab. Kediri.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *(Nonprobability Sampling Design)* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur-unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan mencari data primer, dengan menyebar kuesioner kepada para responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

1. Statistik Diskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel dalam penelitian ini. Alat analisis yang digunakan adalah nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2011: 160),"Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu / residual memiliki distribusi normal."

b. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2011: 105),"Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau tidak."

c. Uji Heteroskedastisitas

Untuk menentukan heteroskedastisitas dapat menggunakan grafik scatterplot. Titik-titik harus menyebar secara acak baik diatas maupun dibawah angka 0 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Ghozali (2011: 115)," Analisis regresi linier berganda mengenai ketergantungan variabel terikat dengan variabel bebas dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas yang diketahui.

4. Uji Hipotesis

a. Uji t (Parsial)

Menurut Ghozali (2011:98)," Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lainnya konstan."

b. Uji F (Simultan)

Menurut Ghozali (2011:98)," Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen."

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2011:97), "Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen."

III. HASIL DAN KESIMPULAN

A. Intepretasi Hasil Analisis

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal yang menunjukkan pola distribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

variabel kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,709 : 0,723 : 0,907 yang lebih besar dari 0,10 dan VIF sebesar 1,410; 1,383; 1,103 yang lebih kecil dari 10, dengan demikian dalam model ini tidak ada masalah multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan oleh grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Maka menunjukkan bahwa model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi linier berganda yang diperoleh dari hasil analisis yaitu Y = -1,152 + 0,199 kkn + 0,228 pmp + 0,260 pnp

B. Pembahasan

1. Kewajiban kepemilikan NPWP (X_1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak (Y).

Variabel kewajiban kepemilikan NPWP (X_1) mempunyai koefisien regresi 0,199 nilai t hitung sebesar 3,215 signifikan pada 0,002 artinya nyata pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak adalah sebesar 19,9%. Sifat pengaruh yang bertanda positif (searah) menunjukkan bahwa apabila reliabilitas mengalami kenaikan maka penerimaan pajak juga akan mengalami kenaikan sebesar 19,9%.

2. Variabel pemeriksaan pajak (X_2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak (Y).

Variabel pemeriksaan pajak (X_2) mempunyai koefisien regresi 0,228 nilai t hitung sebesar 3,732 signifikan pada 0,000 artinya nyata pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajakadalah sebesar 22,8%. Sifat pengaruh yang bertanda positif (searah) menunjukkan bahwa apabila reliabilitas mengalami kenaikan maka penerimaan pajak juga akan mengalami kenaikan sebesar 22,8%.

3. Variabel penagihan pajak (X_3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak (Y).

Variabel penagihan pajak (X_3) mempunyai koefisien regresi 0,260 nilai t hitung sebesar 3,059 signifikan pada 0,003 artinya pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak adalah sebesar 26,0%. Pengaruh yang bertanda positif (searah) menunjukkan bahwa apabila reliabilitas mengalami kenaikan maka penerimaan pajak juga akan mengalami kenaikan sebesar 26,0%.

4. Variabel kewajiban kepemilikan NPWP (X_1), pemeriksaan pajak (X_2), dan penagihan pajak (X_3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak (Y).

Variabel kewajiban kepemilikan NPWP (X_1), pemeriksaan pajak (X_2), dan penagihan pajak (X_3) mempunyai F_{hitung} 25,097 dengan tingkat signifikan 0,000, karena probabilitas 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak artinya bahwa kewajiban kepemilikan NPWP (X_1), pemeriksaan pajak (X_2), dan

penagihan pajak (X_3) mempengaruhi penerimaan pajak.

C. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Responden penelitian ini berjumlah 70 orang pegawai pajak (fiskus) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah Kab.Kediri. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Mandiri Pare.
2. Variabel Pemerikasaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Mandiri Pare.
3. Variabel Penagihan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Mandiri Pare.
4. Variabel kewajiban kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Mandiri Pare.

Model teoritis yang dikembangkan dan diuji dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman kita tentang kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak yang mempengaruhi penerimaan pajak. Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting bagi masyarakat khususnya wajib pajak dan fiskus atau petugas pajak.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Anastasia, Diana dan Lilis Setiawati. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Edisi kedua: Yogyakarta.

Fitriyani, Dewi. 2009. *Peran Savant dalam Perencanaan Pajak menghadapi Penerapan UU PPh Tahun 2008 dan Kewajiban Kepemilikan NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi*. ISSN, Vol.100.

Fitriyani, Dewi dan Wiwik Tiswiyanti. 2009. *Penerapan UU PPh No. 36 Tahun 2008 Manfaat dan Implikasi bagi Wajib Pajak Pribadi*. Jurnal Cakrawala Akuntansi. Vol.1, No.1.

Ghozali, Imam. 2011 *.Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ginting, Riskon. Maret 2009. *Pengaruh Pemberian Surat Penagihan terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak Penghasilan*. Jurnal Ekonomi & Bisnis, Vol.5, No.1.

Gisijanto dan Syahab. 2008. *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak*. Jurnal Ekonomi Akuntansi Pajak.

Hamid, Abdul. 2007. *Panduan Penulisan Skripsi*. Cetakan 1, FEIS UIN Press. Jakarta.

Herryanto, Marisa dan Agus Arianto Toli.2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan*. Tax and Accounting Review. Vol.1, No.1.

Listyaningtyas, Ellya Florentin. 2012. *Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan dalam rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (Studi kasus di KPP Tulungagung)*: Surabaya.

Mardiasmo, 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi, Andi. Yogyakarta.

Muliari, Ni Ketut. 2009. *Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. Jurnal Ekonomi Udayana.

Pardiat. 2008. *Pemeriksaan Pajak*. Edisi Kedua. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Prastowo, Yustinus. 2009.*Panduan Lengkap Pajak, Raih Asa Sukses*. Jakarta.

Priyatno, Duwi. 2013. *Mandiri Belajar Analisis Data dengan SPSS.* Yogyakarta: MediaKom.

Purba, Arifanda. 2012. *Analisis Hasil Pemeriksaan Pajak Tahun 2008-2011 untuk Menentukan Pola Profil wajib pajak Badan yang Potensial di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah*. Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Rahayu, Siti Kurnia. 2010.*Perpajakan Indonesia (Konsep dan Aspek Sosial)*. Yogyakarta: Cetakan Pertama, Graha Ilmu.

Resmi, Siti.2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Ketujuh. Jakarta: Salemba Empat.

Setiawan, Deddy Arief. 2007. *Analisis Hubungan antara Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Surat Setoran Pajak dengan Penerimaan Pajak (Studi kasus pada KPP Jakarta Palmerah)*. Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi. Vol.7, No.1.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan ke-13. Bandung: Alfabeta cv.

Suandy, Early. 2008. *Perpajakan.* Jakarta: Salemba Empat.

Sujatmiko, Bambang. 2011. *Kewajiban Pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Tinjauan terhadap Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 35/PJ/2008)*. Jurnal *Socioscientia* Kopertis Wilayah XI Kalimantan Vol.3, No.2.

Sukirman. 2011. *Pengaruh Manajemen Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak*. Analisis Manajemen. Vol.5, No.1.

Tansuria, Billy Ivan. 2010. *Pokok-pokok Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)*. Yogyakarta: Cetakan Pertama, Graha Ilmu.

Vegirawati, Titin. 2011. *Hubungan antara Penerbitan Surat Tagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang*. Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi, Vol.1 No.3.

Waluyo, 2009. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagian Pajak dengan Surat Paksa.

www.kabarbisnis.com/read/2819386, artikel tersebut di akses tanggal 8 April 2015, pada pukul 12:58.

www.pajak.go.id/content/article/subsidi-bbm-dan-penarikan-pajak, artikel tersebut di akses tanggal 30 Mei 2015, pada pukul 11:22.

www.bisnis.news.viva.co.id/news/read/68621jumlah_npwp_tambah_3-4_juta, artikel tersebut di akses tanggal 22 Juni 2015, pada pukul 10:41.

www.jpnn.com/read/2012/07/10/133377/konsultan-pajak-PT-Mutiara-virgo-ditahan-artikel tersebut di akses tanggal 10 Juli 2015, pada pukul 12:43.

www.bps.go.id/tab_sub/view.phtabel=1&daftar=1&id_subyek=13, di akses pada 2 Agustus 2015.